

# PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA RAKSABAYA KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS

Eet Saeful Hidayat<sup>1</sup>, R Didi Djadjuli<sup>2</sup>, Wawan Risnawan<sup>3</sup>

Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: esapamungkas85@gmail.com

## ABSTRAK

*Pemerintah desa idealnya menjadi lokomotif perubahan semua sektor kehidupan masyarakat, dan harapan itu belum bisa diwujudkan secara nyata dalam manajemen pembangunannya. Salahsatunya adalah bidang ekonomi yang memiliki implikasi besar terhadap perubahan sektor lainnya. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi agar masyarakat memiliki kemandirian, kesadaran dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat. Fenomena ini ditandai oleh lemahnya penguatan kapasitas pelaku usaha dan tidak memiliki roadmap pengembangan ekonomi yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data primer penelitian yaitu informan sebanyak 9 orang menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan yaitu sutif literatur, observasi dan wawancara. Teknik analisis data mengunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan hasil penelitian yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa belum optimal, dilihat dari 3 dimensi dan 10 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian masih menunjukan persepsi yang rendah, Adapun hambatan yang ditemukan diantaranya kompetensi sumber daya manusia SDM, motivasi rendah, sikap apatis, daya dukung anggaran dan kemitraan, sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan melalui Peningkatan kapasitas perangkat desa, memberikan motivasi pada pelaku usaha dan meningkatkan rasa perhatian dan komunikasi dengan pelaku usaha, pendekatan dan komunikasi kemitraan kepada pihak-pihak pengusaha juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan pembinaan.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan ekonomi, Masyarakat, Pemerintah Desa*

## ABSTRACT

*The village government should ideally become a locomotive for change in all sectors of people's lives, and this hope has not yet been realized in real terms in its development management. One of them is the economic sector which has major implications for changes in other sectors. Economic empowerment is one of the programs to realize community welfare, which aims to motivate people to have independence, awareness and improve the quality of the community's economy. This phenomenon is marked by the weak capacity building of business actors and does not have a systematic economic development roadmap. This study uses a qualitative descriptive research method. The primary data source for the research was 9 informants using a purposive sampling technique, while the collection techniques were sufficient literature, observation and interviews. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusion of the research results is that the community's economic empowerment by the village government is not optimal, seen from 3 dimensions and 10 indicators that are used as research measurement tools still address low perceptions. The obstacles found include competency in human resources, low motivation, apathy, carrying capacity budget and partnerships, while efforts are being made to overcome obstacles through increasing the capacity of village officials, providing motivation to business actors and*

*increasing a sense of concern and communication with business actors, partnership approaches and communications to businessmen also allocate a budget to finance coaching activities.*

**Keywords:** *Economic Empowerment, Community, Village Government*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional dimana konsepsi tersebut menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs) Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan seperti yang statmemnet Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs) Desa menjadi arah kebijakan pembangunan desa hingga 2030. (<https://www.kemendes.go.id>) yang merefleksikan urgensi peran ekonomi masyarakat desa bagi Indonesia adalah sebagai bantalan atau buffer keadilan ekonomi dan (Kemendes PDTT) sejak tahun 2021.

Salah satu konsep dalam pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi, karena dampak pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan parameter keberhasilan program pembangunan dan perkembangan kesejahteraan dimana terjadinya pertambahan barang dan jasa produksi yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pembangunan berbasis pedesaan terutama sektor ekonomi merupakan isu utama yang harus diprioritaskan secara intens dan serius oleh pemerintah dan stakeholders Desa dalam aktivitas perencanaan, fasilitator, pengawasan dan evaluator melalui sinergi dan kolaborasi yang akan menstimulasi lahirnya perubahan baik material, *mindset* dan *public trust* yang akan mendorong masyarakat secara sadar membangun kapasitas internal sehingga memiliki kemampuan untuk memberdayakan diri sendiri dan lingkungannya membangun mentalitas dan etos kerja yang baik, semangat

bekerjasama guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, maju, dan memiliki daya saing. Untuk menuju harapan tersebut strategi pemberdayaan masyarakat terutama pada sektor ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang mendesak diprioritaskan oleh Pemerintah Desa sebagai sebuah pematik perubahan di sektor-sektor lainnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa merupakan langkah konkrit guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya, dengan demikian ada pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana dan implementasi langkah pemberdayaan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan, yang sasarannya difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadi pedoman dalam melakukan pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan. Hal ini merefleksikan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan secara mandiri melakukan upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat dalam segi ekonomi.

Program pembangunan desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan langkah strategis sebagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan kompetensi pelaku usaha, lembaga dan organisasi masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, dengan asumsi bahwa

anggota dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor internal dan eksternal.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu misi yang dipilih pemerintah desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang ukur melalui indikator berkurangnya pengangguran, kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Proses indentifikasi potensi, pengelompokan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi masyarakat menjadi bagian dari rencana strategis yang diarahkan pada upaya untuk memetakan potensi ekonomi dan penyusunan rencana kegiatan, langkah – langkah pelaksanaannya.

Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis termasuk kaya dengan potensi sumber daya alam, terutama dari hasil pertanian, dan perkebunan yang oleh masyarakat diolah sehingga dapat dijadikan sumber tambahan pendapatan. Selain itu usaha produksi kerajinan tangan dari bambu, besi, makanan ringan menjadi salah satu sumber mata percaharian masyarakat desa. Namun demikian kegiatan masyarakat di sektor olahan hasil perkebunan masih terkendala kurangnya kemampuan pengelolaan, pemasaran, kualitas produksi yang masih konvensional. Pola usaha demikian berdampak pada akselerasi peningkatan usaha yang digeluti masyarakat seain faktor eksternal yang turut mempengaruhinya seperti keterbatasan modal usaha, inovasi produk, rendahnya kreatifitas dan keterampilan-keterampilan penunjang usaha yang kurang berkembang. Ini menunjukkan bahwa, pelaku usaha di masyarakat masih belum optimal dalam mengelola.

Merujuk pada fenomena keerbatasan pelaku usaha di atas, maka pada dasarnya inisiatif perubahan harus ada pada pemerintah desa dalam mengelola seluruh potensinya,

termasuk meningkatkan kapabilitas pelaku usaha karena pada dasarnya pemerintah desa adalah penyangga perubahan yang melaksanakan aktifitas dalam mencapai suatu tujuan. Pemberdayaan ekoomi masyarakat jelas membutuhkan peran pemerintah desa diman peranan pemerintah disini adalah menyusun kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi pelaku usaha

Namun kenyataannya dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Raksabaya, Pemerintah Desa Raksabaya dalam memberdayakan masyarakat di sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator diantaranya:

1. Pemerintah desa belum secara intens mengedukasi masyakat dalam memahami potensi ekonominya
2. Pemerintah Desa masih lemah dalam mambangun koordinasi dengan *stakeholder*
3. Lemahnya dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat berupa menjalain kerjasama dengan dinas terkait, privat sektor, upaya bantuan permodalan dan akses informasi.
4. Daya dukung SDM perangkat dan pelaku ekonomi yang rendah
5. Strategi pemberdayaan yang belum tersusun secara sistematis dan berkelanjutan

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pemberdayaan**

Menurut KBBI pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak (<https://kbbi.web.id>) Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Suharto (2010:59-60), berpendapat bahwa

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Sedangkan Sulistiyani, (2004:79) mengatakan inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu, pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Begitupun pandangan Utami (2019:15) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan adalah suatu usaha yang harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan kemudahan untuk mengakses berbagai peluang yang mendukung pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan merupakan perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik. Jadi, yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial.

Setiap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yaitu menunjuk pada tingkatan kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan atau kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada satu sisi pembangunan berkelanjutan tidak hanya

berorientasi kepada pemeliharaan sumber daya alam tetapi juga menyediakan kebutuhan manusia yang didalamnya terjadi simbiosis ekonomi, sosial dan sistem lingkungan. faktor ekonomi yang berkelanjutan dalam hubungannya dengan hubungan sosial sangat tergantung dari lingkungan dan sebalaliknya. (Siregar, 2021:27)

Selaras dengan Sumodiningrat (Mardikanto dan Soebiato, 2019: 33-34) menyatakan bahwa Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumberdaya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya dan terdapat tiga pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutkan sebagai tri bina yaitu: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

#### 1. Bina manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat. Dibina manusia mengutamakan sekali kapasitas dari masyarakatnya karena masyarakat yang akan dibina harus mengerti apa yang akan menjadi pemberdayaan yang ada di daerah tersebut.

#### 2. Bina usaha

Bina usaha menjadi upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina usaha yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) tidak akan laku dan bahkan menambah kekecewaan. Maka dari itu setiap pemberdayaan usaha harus tahu apa

yang lebih cocok untuk jenis usaha yang akan dipilih dalam pemberdayaan

### 3. Bina lingkungan

Bina lingkungan menjadi sangat penting hal ini terlihat pada setiap pemberdayaan yaitu analisis manfaat dan dampak lingkungan, karena pelestarian lingkungan akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku). Dalam bina lingkungan tidak hanya dari sumber daya alam akan tetapi juga lingkungan sosialnya, karena lingkungan sosial pula akan menambah pengaruh dalam meningkatkan pemberdayaan.

Diperkuat pula oleh Iffe (Anwas, 2019:49) mengemukakan bahwa Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

#### **Pengertian Pemberdayaan Ekonomi**

Sebagai makhluk sosial manusia akan melakukan interaksi dengan lingkungan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya termasuk melakukan kegiatan ekonomi. Seiring dinamika pertumbuhannya secara intens akan mengalami pertumbuhan dan perubahan baik sifat dan jenisnya.

Namun dalam kegiatan berekonomi tersebut terkadang mengalami kendala yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi pihak eksternal dalam hal ini pemerintah desa untuk memberikan dorongan, rangsangan, tekanan dan motivasi sehingga memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan yang terjadi. Disinilah peran pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengubah kondisi masyarakat dalam menemukan alternatif memecahkan berbagai

masalah terkait peningkatan kuantitas dan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.

Menurut Hutomo (2000) Pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multiaspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya

Diperkuat oleh Suharto, (2010:68), yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan masyarakat kecil.

Dengan demikian bahwa kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini diproyeksikan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki wilayah yang akan berimplikasi pada perubahan kondisi masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Aktivitas pemberdayaan tersebut membutuhkan support dari pemerintah dan stakeholder karena memiliki otoritas dan kemampuan regulatif, finansial, market dan jejaring. Yang akan mempermudah pencapaian tujuan pemberdayaan yakni

terbangunnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

Hikmat, (2010:14) menyatakan bahwa: “Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”. Selaras dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2018:111), tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan lingkungan (*better environment*), perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas
- 2) Perbaikan kehidupan (*better living*), tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang memabik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
- 3) Perbaikan masyarakat (*better community*), keadaan kehidupan yang lebih baik, yang disukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan

program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, industri rumah tangga, BUMDesa, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. ([https://www.google.com/pemberdayaan\\_ekonomimasyarakat](https://www.google.com/pemberdayaan_ekonomimasyarakat))

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta adapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Dengan demikian Pemberdayaan ekonomi juga merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi mampu membuat masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya, dalam pemberdayaan ekonomi akan memprioritaskan kepada sumberdaya manusia dan sumber daya alamnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin mengungkap fakta-fakta di lapangan melalui literatur yang ada, serta perilaku yang dapat diamati yang nantinya dikaitkan dengan teori yang digunakan.

Adapun yang menjadi *grounded theory* pada penelitian ini menggunakan pendapat dari Mardikanto dan Soebiato (2019: 30-32), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi

atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*envowering*) dan melindungi.

Sumber data primer menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. bersumber langsung dari 9 orang informan, melalui wawancara, Observasi tentang variabel penelitian sedangkan data sekunder (Studi dokumentasi mempelajari data-data, dokumen-dokumen yang terdiri dari Undang-Undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisa yang digunakan Reduksi Data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikutnya akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan tiap-tiap dimensinya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian pada dimensi menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) dapat diketahui belum optimal, dilihat dari rata-rata jawaban informan pada 4 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, diketahui mayoritas informan masih mempersepsi bahwa pemerintah desa belum secara nyata dan sistematis mendorong pelaku usaha.
  - a. pada indikator pemerintah desa melakukan pemetaan potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan peluang usaha dilaksanakan sudah berjalan namun belum optimal.
  - b. indikator pemerintah desa melakukan sosialisasi program pengembangan potensi sumber daya alam sudah dilaksanakan namun belum optimal.
  - c. indikator pemerintah desa memberkan motivasi perubahan mengembangkan kegiatan usaha belum optimal dan
  - d. indikator pemerintah desa menyediakan infrastruktur peunjang kegiatan usaha belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis dapat diketahui bahwa strategi yang menjadi pertimbangan, dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa perlu pengkajian ulang dan diperbaiki pada tahap implementasinya. Konsep Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini berawal dari perubahan *mindset* kemudian *culturset*, sehingga pada gilirannya nanti bisa mengeliminir ketergantungan masyarakat terhadap berbagai program bantuan akan tetapi memandirikan, memampukan dan membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri guna menikmati hasil atas proses yang dihasilkan atas usaha sendiri dan memiliki nilai ekonomi. Sependapat dengan Marmoah (2014: 56) bahwa “Pemberdayaan masyarakat adalah proses perubahan sikap dan perilaku sosial oleh masyarakat itu sendiri dengan jalan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang ada.”

2. Hasil penelitian pada dimensi memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*envowering*) adalah belum optimal, dilihat dari rata-rata jawaban informan pada 2 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, diketahui mayoritas informan masih menpersepsi bahwa pemerintah desa belum secara terarah, terpadu dan terintegrasi dalam melakukan aktivitas penguatan kapasitas pelaku usaha.
  - a. Pada indikator program bimbingan teknis rutin tentang manajemen wirausaha belum berjalan.
  - b. indikator memfasilitasi jejaring dan permodalan untuk mengembangkan kegiatan usahanya masih terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat *bargaining positions* masyarakat terhadap tekanan – tekanan yang melemahkan potensinya.

Penguatan pengetahuan, keterampilan dan modal usaha diproyeksikan sebagai proses untuk memperkuat keberdayaan sedangkan perubahan sosial memungkinkan terjadinya sebuah keadaan atau hasil yang ingin dicapai. Pemberdayaan kemampuan pelaku usaha baik secara teknis maupun pengetahuan adalah upaya pemerintah desa dalam membangun sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya, hal ini senada dengan Handini, et al (2019: 184) mengatakan bahwa dengan kegiatan bimbingan yang terus-menerus, masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri.”

3. Hasil penelitian pada dimensi Memberdayakan mengandung pula arti melindungi dapat diketahui belum optimal, dilihat dari rata-rata jawaban informan pada 3 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian. diketahui mayoritas informan masih menpersepsi bahwa pemerintah desa sebagai pemegang otoritas, kreator dan inisiator pembangunan di wilayah belum terealisasi

- a. Pada indikator penguatan kompetensi kepada pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan usahanya masih belum konsisten,
- b. Pada indikator pelatihan dan pendidikan kegiatan usaha juga belum optimal
- c. Pada indikator menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya masih belum bisa menjembatani.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis diketahui bahwa pada pelaksanaan dimensi memberdayakan mengandung pula arti melindungi diketahui bahwa pelaksanaan indikator penguatan kompetensi, pembinaan

melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan serta menjaga persaingan usaha masih membutuhkan beberapa perbaikan dan perubahan strategi yang paling adaptif dengan aspirasi pelaku usaha.

Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. Payne (Marmoah, 2014: 52) mengemukakan bahwa: Suatu proses pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan Tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

### **Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberdayaan ekonomi Masyarakat oleh Pemerintah Desa**

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Desa, diantaranya adalah:

1. Data potensi wilayah belum ditindaklanjuti dengan program-program yang relevan dimana program pemberdayaan ekonomi masyarakat belum terintegrasi dengan program pembangunan desa
2. Belum terbangunnya kesamaan persepsi antar unsur pemerintahan desa dalam menentukan skala prioritas pengembangan potensi sumber daya alam
3. Kemampuan manjerial pelaku usaha yang masih menggunakan pola konvensional sehingga lambat untuk berubah

4. Belum adanya anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan
5. Animo pelaku usaha mengikuti kegiatan bimtek tidak dibarengi kemauan dan keinginan yang kuat untuk berubah dan waktu yang dimiliki terbatas
6. Rendahnya daya kemampuan perangkat desa dalam membina hubungan dengan pihak lain
7. Konsistensi komunikasi pemerintah desa dengan pelaku usaha
8. Minat pelaku usaha meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara mandiri
9. Kegiatan pembinaan pelaku usaha melalui pelatihan dan pendidikan belum mengakomodir kebutuhan utama dari pelaku usaha
10. Tidak adanya aturan yang bisa dijadikan pedoman oleh pelaku usaha hanya sebatas himbauan lisan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Raksabaya ini secara esensial terletak pada keterbatasan sumber daya manusia baik perangkat desa juga pelaku usaha yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dibidang usaha.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Adi (2013 : 259) bahwa salah satu kendala yang menyebabkan program pemberdayaan tidak berjalan mulus dalam pelaksanaannya adalah adanya kelompok-kelompok dalam komunitas yang menolak upaya pembaruan atau perubahan yang terjadi. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat bukanlah program insidental akan tetapi memerlukan proses yang panjang secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang

paling tepat untuk kelompok sasaran yakni pelaku usaha

### **Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pemerintah Desa**

Adapun upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder desa dalam Internalisasi data potensi wilayah
2. Menyamakan pemahaman tentang potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan peluang usaha dengan mengikutsertakan perangkat desa khususnya seksi ekonomi
3. Menstimulasi perubahan pemahaman pelaku usaha dengan mengundang pakar dari dinas terkait, swasta dan pengusaha sukses
4. Melakukan konsolidasi dengan BPD dalam menyusun rencana anggaran ada alokasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat
5. Memotivasi pelaku usaha dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa dan masyarakat
6. Peningkatan kompetensi perangkat dengan cara mengikutsertakan perangkat desa terutama bidang ekonomi dalam kegiatan ilmiah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Meningkatkan komunikasi lembaga dengan pelaku usaha secara personal maupun kolektif untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah menuju ke arah yang lebih baik
8. Melakukan komunikasi persuasif dengan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan secara mandiri dan menyediakan agenda pertemuan setiap bulan
9. Menyerap aspirasi pelaku usaha tentang kebutuhan pengembangan usaha yang bisa difasilitasi pemerintah desa

10. Bersama BPD menyusun rancangan Peraturan desa tentang ekonomi yang kemudian bisa dijadikan pedoman dalam berekonomi di wilayah

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa lebih bertumpu kepada *political will* dan *Good Will* pemerintah desa dengan seluruh unsur pemerintahannya. Peran kepala desa sebagai inisiator perubahan masih belum disupport secara penuh oleh perangkat desa sehingga konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan semua dimensi perubahan yang diharapkan bejalan lambat. Fenomena ini disukung oleh pendapat Mardikanto dan Soebiato (2019: 41) bahwa Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh pemerintah desa belum optimal, dilihat dari 3 dimensi dan 10 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian masih menunjukan persepsi yang rendah. Hambatan yang ditemukan diantaranya keterbatasan SDM, motivasi rendah, sikap apatis, daya dukung anggaran, kemitraan. Kemudian Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah melakukan Peningkatan kapasitas perangkat desa dan pelaku usaha (formal dan non formal), pemotivasian, komunikasi secara persuasif, Alokasi anggaran, fasilitasi jejaring pendanaan serta penjajagan kemitraan dengan privat sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat, Dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Anwas, Oos M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media.
- Hikmat, Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marmoah, Sri. 2014. *Pemberdayaan Pempuan Rimba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Utami, Ajeng Dini. 2019. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Desa Pustaa Indonesia.
- Suharto,Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Siregar, Dodi. 2021. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

## Jurnal

- Dimas Alif Budi N., M. Saleh Soeaidy, Minto Hadi (2012), Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya) <https://media.neliti.com/media/publications/74804-ID-implementasi-program-pemberdayaan-masyar.pdf>
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 136-142
- Mardi Yatmo Hutomo, (2000) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*,

dalam Naskah No. 20, Juni-Juli 2000. h.  
3)

Subejo dan Supriyanto (2004) Buletin  
Ekstensia Pusat Penyuluhan Pertanian  
Deptan RI Vol 19/Th XI/2004

**Website**

<https://www.kbbi.go.id>

<https://www.kemendesdesa.go.id/berita/view/detil/4351/sdgs-desajadiarahkebijakan-pembangunan-desahingga2030>

<https://www.google.com/search?q=pemberdayaan+ekonomi+masyarakat+pdf&oq=pemberdayaan+ekonomi+m&aqs=chrome..69i57j0i512l7.7779j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>